



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi SIPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Doni Mauludi Supeno¹, Sunariyanto²

¹ University Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia, donimauludi1486@gmail.com

² University Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia, sunariyanto@unisma.ac.id

Corresponding Author: donimauludi1486@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) policy in enhancing the accountability of the Pasuruan Regency Government. SIPD is a digital instrument designed to integrate planning, budgeting, and reporting processes to promote transparent and accountable governance. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The analysis is based on Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and is complemented by Grindle's perspective on policy content and context. The findings indicate that the implementation of SIPD in Pasuruan Regency has been carried out but has not yet been fully optimized in improving overall accountability. The main challenges lie in ineffective communication, limited human resources and technological infrastructure, and suboptimal coordination among local government agencies. Nevertheless, SIPD has contributed to enhancing transparency and the traceability of administrative processes. This study concludes that the success of SIPD implementation is strongly influenced by organizational readiness and the quality of supporting resources. Therefore, strengthening human resource capacity, improving technological infrastructure, and optimizing inter-agency coordination are necessary to enhance the effectiveness of SIPD in supporting government accountability. Practically, this study recommends that the Pasuruan Regency Government accelerate the strengthening of human resource capacity through continuous technical training and the provision of adequate server infrastructure.*

Keyword: *SIPD, Policy Implementation, Accountability, Local Government, Digital Governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pasuruan. SIPD merupakan instrumen digital yang dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis

dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta diperkaya dengan perspektif Grindle terkait isi dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, namun belum optimal dalam meningkatkan akuntabilitas secara menyeluruh. Kendala utama terletak pada aspek komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Meskipun demikian, SIPD telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan keterlacakan proses administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan kualitas sumber daya pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas sistem dalam mendukung akuntabilitas pemerintah daerah. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan percepatan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis berkelanjutan dan pemenuhan infrastruktur server yang memadai.

Kata Kunci: SIPD, Implementasi Kebijakan, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Digital Governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang masif saat ini menuntut adanya transformasi mendasar pada birokrasi pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan efisien. Inovasi di sektor publik kini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mas'ud Said (2007) yang menegaskan bahwa inovasi merupakan perubahan terencana yang memanfaatkan teknologi dan mengintegrasikan sumber daya untuk menciptakan nilai baru di mata masyarakat. Sebagai respons atas tuntutan adaptasi tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Kebijakan publik ini, sebagaimana ditegaskan oleh pandangan Carl Friedrich (dalam Arifah Umi, 2018) maupun Wahab (2010), pada hakikatnya adalah serangkaian tindakan terarah oleh pemerintah yang saling berkaitan erat untuk mencapai tujuan tata kelola yang lebih baik demi kepentingan masyarakat luas.

Sebagai wujud spesifik dari penerapan SPBE di tingkat daerah, Kementerian Dalam Negeri memberlakukan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019. Kehadiran SIPD dirancang secara khusus untuk mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan pembangunan daerah secara nasional. Visi utamanya adalah mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, ditinjau secara konseptual, implementasi sebuah kebijakan adalah proses dinamis yang melampaui sekadar rutinitas administratif. Implementasi merupakan interaksi dan aksi yang terus disesuaikan untuk mencapai sasaran secara terencana, sebagaimana diungkapkan oleh para ahli seperti Agustino (2008) dan Setiawan (2004).

Meskipun memiliki landasan konseptual dan tujuan yang ideal, dalam praktiknya, implementasi SIPD masih menghadapi jalan terjal dan berbagai rintangan. Terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas eksekusi di lapangan. Berbagai studi terdahulu telah membuktikan hal ini. Penelitian Yosephus Yacobus David (2022), menemukan bahwa implementasi SIPD kerap terkendala oleh minimnya kuantitas pelaksana yang kompeten, infrastruktur jaringan internet yang belum memadai, serta terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi aparatur di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di sisi lain, studi dari Alikha Novira (2023) turut menyoroti minimnya fasilitas penunjang, rendahnya kedisiplinan atau disposisi dari para pelaksana, serta absennya

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait evaluasi data yang seharusnya dapat mempermudah kinerja instansi perencana.

Fenomena kesenjangan implementasi ini nyatanya tidak hanya tergambar dalam literatur, melainkan juga teridentifikasi secara faktual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil pra-survei dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tahun 2025, terungkap dua kendala utama yang menghambat efektivitas sistem ini. Pertama, dari segi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), ditemukan fakta bahwa aparatur yang ditugaskan sebagai operator teknis belum sepenuhnya menguasai mekanisme pengoperasian sistem. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan Operator SIPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pasuruan, yang mengungkapkan:

“Dalam pelaksanaannya memang masih ada pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem SIPD, terutama bagi pegawai yang baru ditugaskan sebagai operator sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem.” (Wawancara, 2025).

Keterbatasan kompetensi pada level operator ini berdampak langsung pada keterlambatan siklus penginputan data perencanaan dan penganggaran. Kedua, dari aspek komitmen organisasi, penggunaan SIPD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpantau belum menjadi prioritas utama. Urgensi masalah ini semakin terlihat dari hasil diskusi dengan Staf Bidang Perencanaan pada salah satu OPD di Kabupaten Pasuruan, yang menyoroti perilaku administratif aparatur:

“Sebagian OPD biasanya melakukan penginputan data ketika mendekati batas waktu yang ditentukan, sehingga proses verifikasi dan sinkronisasi data perencanaan sering dilakukan secara terburu-buru.” (Wawancara, 2025).

Budaya kerja yang cenderung last-minute ini mengakibatkan proses validasi data menjadi tidak akurat. Apabila dibiarkan, kondisi tersebut sangat berisiko mencederai esensi utama SIPD, yakni menciptakan proses perencanaan dan keuangan daerah berbasis data (Data-Driven Policy) yang akuntabel.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Pasuruan tidak sekadar persoalan teknis aplikasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika organisasi, kesiapan SDM teknis, serta konsistensi komitmen para pelaksana di lapangan. Dengan demikian, implementasi SIPD harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan transparansi, integrasi data, dan akuntabilitas keuangan daerah secara menyeluruh.

Berangkat dari ragam permasalahan tersebut, diperlukan sebuah kajian yang lebih mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada analisis deskriptif terkait efektivitas sistem atau sebatas memotret digitalisasi administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir menawarkan kebaruan (novelty) dengan menggunakan pisau analisis teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berfokus pada proses teknis pelaksanaannya, tetapi juga mampu menganalisis derajat perubahan (*extent of change envisioned*) dengan mengintegrasikan dua pilar utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Melalui pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menganalisis secara utuh bagaimana implementasi kebijakan SIPD berkontribusi dan berdampak langsung dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berpendekatan deskriptif untuk mengkaji secara mendalam fenomena implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam upaya meningkatkan akuntabilitas di Pemerintah

Kabupaten Pasuruan. Sebagai pisau analisis, penelitian ini memadukan teori implementasi George C. Edward III yang menyoroti aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan dua dimensi dari Merilee S. Grindle, yakni tipe manfaat dan derajat perubahan. Kajian ini difokuskan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis dengan melibatkan 14 informan kunci, mulai dari tingkat manajerial hingga pelaksana teknis, yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) agar relevan dengan fokus studi.

Dalam proses pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data secara komprehensif dengan memadukan sumber primer melalui observasi dan wawancara mendalam, serta sumber sekunder berupa studi dokumentasi dan literatur. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman, yang mengalir dinamis dari proses pengumpulan data, reduksi (pemilahan data pokok), penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Terakhir, guna menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil penelitian, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan cara menyilangkan dan memvalidasi ragam informasi dari berbagai narasumber maupun dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komprehensif Implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak sekadar merepresentasikan transisi teknologi, melainkan sebuah transformasi tata kelola birokrasi yang komprehensif. Kebijakan ini membawa implikasi luas terhadap bagaimana pemerintah daerah merencanakan, menganggarkan, dan mempertanggungjawabkan pembangunan. Untuk memahami efektivitas transisi ini, kita dapat membedahnya melalui berbagai dimensi implementasi, mengidentifikasi faktor determinan keberhasilannya, menganalisis tantangan di lapangan, serta mengukur kontribusi nyatanya terhadap akuntabilitas publik.

1. Analisis Implementasi Kebijakan (Perspektif George Edward III & Merilee S. Grindle)

Ditinjau dari kerangka teoretis implementasi kebijakan, efektivitas pelaksanaan SIPD di Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi melalui enam dimensi fundamental. Pada dimensi Komunikasi, proses transmisi kebijakan telah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini dibuktikan melalui intensitas sosialisasi, rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penerbitan surat edaran yang sistematis. Pemahaman yang komprehensif terhadap landasan normatif, khususnya Permendagri No. 70/2019, bermuara pada tingginya konsistensi aparatur dalam mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan dan penganggaran.

Kesiapan ini juga ditopang secara solid oleh dimensi Sumber Daya. Kapasitas institusional daerah dinilai sangat memadai, di mana alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai penanggung jawab dan operator telah didistribusikan secara proporsional sekitar 4 hingga 7 personel per OPD menyesuaikan dengan beban kerja spesifik masing-masing instansi. Kesiapan perangkat keras, stabilitas jaringan internet, serta pemahaman terhadap perangkat lunak menjadi fondasi teknis yang mumpuni. Di samping itu, dimensi Disposisi (Komitmen) menunjukkan orientasi sikap yang sangat positif. Para pelaksana tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi memiliki kesadaran internal yang kuat untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi mewujudkan *Good Governance*.

Dari sisi tata kelola, dimensi Struktur Birokrasi menunjukkan adanya pembagian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang tegas di setiap OPD. Kendati demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan manajerial; saat ini instansi di daerah masih sepenuhnya bergantung pada SOP makro yang dirancang oleh pemerintah pusat (Kemendagri) dan belum menginisiasi pengembangan SOP turunan yang lebih adaptif terhadap dinamika dan

konteks lokal. Meski begitu, dimensi Tipe Manfaat (*Types of Benefits*) dari sistem ini telah dirasakan secara langsung. SIPD berhasil mendobrak sekat-sekat sektoral, menghadirkan integrasi data yang mulus dari fase perencanaan hingga pelaporan, serta meningkatkan efisiensi waktu administrasi secara drastis. Seluruh pencapaian ini merupakan respons dari dimensi Derajat Perubahan (*Extent of Change Envisioned*), di mana pergeseran dari budaya kerja manual menuju ekosistem digital terintegrasi menuntut adaptasi yang masif. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terbukti mampu mengelola resistensi dan menjembatani kesenjangan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan pendampingan teknis yang berkesinambungan.

2. Faktor Kunci Keberhasilan Implementasi

Mengacu pada proses adaptasi birokrasi tersebut, terbukti bahwa keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan tidak bergantung pada satu faktor determinan saja, melainkan lahir dari integrasi multidimensional antara empat elemen strategis. Pertama, keberadaan komunikasi yang terstruktur mampu menjembatani perbedaan pemahaman, memastikan terciptanya kesamaan persepsi antar-aktor lintas sektoral. Kedua, kompetensi dan kecukupan SDM menjadi motor penggerak yang menjamin bahwa sistem yang kompleks ini dapat dioperasionalkan secara presisi dan berkesinambungan.

Ketiga, tingginya disposisi dan komitmen pelaksana berhasil menciptakan sebuah budaya kerja birokrasi baru yang jauh lebih responsif, tangguh, dan murni berorientasi pada kinerja. Keempat, kejelasan struktur kelembagaan bertindak sebagai katalisator yang mempercepat alur koordinasi. Adanya batasan kewenangan yang jelas ini secara efektif meminimalisasi potensi tumpang tindih (*overlapping*) pekerjaan antar-perangkat daerah, menjadikan mesin birokrasi berjalan lebih efisien.

3. Faktor Penghambat Implementasi

Meskipun terdapat upaya penguatan internal, implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan pelik yang bersifat ekstrinsik. Uniknya, hambatan utama ini tidak berakar pada resistensi birokrasi daerah, melainkan bersumber dari faktor eksternal terkait infrastruktur dan kebijakan manajerial pemerintah pusat.

a) Kerapuhan Infrastruktur Server Sentral

Tantangan pertama terletak pada keterbatasan kapasitas server pusat yang sering mengalami kelumpuhan (*system down*) atau galat (*error*) saat diakses. Fenomena ini merupakan implikasi langsung dari ketidakmampuan infrastruktur server Kementerian Dalam Negeri dalam menampung lonjakan akses serentak (*traffic spike*) dari ribuan OPD di seluruh Indonesia. Bagi operator di Kabupaten Pasuruan, kendala ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan penghambat produktivitas yang menyebabkan akumulasi pekerjaan karena akses yang tidak stabil pada jam-jam krusial.

b) Anomali Jadwal Operasional dan Distorsi Ritme Kerja

Tantangan kedua berkaitan dengan kebijakan manajerial pusat yang sering kali tidak terprediksi. Akses portal penginputan kerap dibuka justru pada hari libur atau di luar jam kerja standar. Ketidakkonsistenan jadwal ini secara signifikan mendistorsi ritme kerja aparatur daerah dan mengganggu keseimbangan kerja (*work-life balance*). Secara profesional, kondisi ini menyulitkan koordinasi vertikal antara staf teknis dan pimpinan untuk validasi data, yang pada akhirnya meningkatkan risiko *human error*. Tanpa sinkronisasi jadwal yang manusiawi, proses penginputan data keuangan dan perencanaan berisiko kehilangan akurasi dan ketepatan waktunya.

4. Kontribusi SIPD terhadap Akuntabilitas Pemerintahan (Perspektif Mardiasmo)

Pada akhirnya, seluruh dinamika implementasi dan upaya mitigasi hambatan tersebut bermuara pada satu capaian strategis: peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kacamata perspektif Mardiasmo, kontribusi SIPD ini dapat dikategorisasi ke dalam empat dimensi akuntabilitas publik yang terukur. Pertama, terkait

Akuntabilitas Kejujuran dan Kepatuhan Hukum, arsitektur SIPD yang beroperasi sebagai sistem tertutup (*locked system*) secara otomatis memaksa setiap OPD untuk tunduk pada format, klasifikasi program, dan nomenklatur kode rekening yang sah. Pembatasan sistemik ini secara efektif menutup rapat ruang negosiasi birokrasi untuk melakukan manipulasi data atau penyisipan anggaran yang tidak sesuai regulasi.

Kedua, pada aspek Akuntabilitas Proses, SIPD berhasil mengubah pola kerja birokrasi menjadi berbasis real-time dan terdokumentasi secara utuh. Setiap tahapan pengusulan dan perencanaan meninggalkan jejak digital yang dapat dilacak (*traceable*), sehingga proses perumusan anggaran menjadi sangat transparan dan dapat dievaluasi oleh berbagai pemangku kepentingan kapan saja. Ketiga, sistem ini mendorong penguatan Akuntabilitas Program dengan mewajibkan adanya koherensi logis yang ketat antara usulan kegiatan, penetapan indikator kinerja, dan target pencapaian akhir. Dampaknya, desain program pembangunan menjadi jauh lebih terstruktur dan tingkat efektivitasnya sangat mudah untuk dievaluasi.

Terakhir, seluruh perbaikan hulu tersebut berpuncak pada penguatan Akuntabilitas Kebijakan. Dengan tersedianya pangkalan data perencanaan dan penganggaran yang terpusat dan valid (*single source of truth*), pimpinan daerah kini memiliki landasan informasi yang empiris. Kondisi strategis ini sangat memfasilitasi para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan publik yang digerakkan oleh data (*data-driven*), rasional, dan pada akhirnya, dapat dipertanggungjawabkan secara absolut kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pasuruan dinilai berjalan efektif dan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan SIPD merupakan respons terhadap Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Sebagai platform terintegrasi, SIPD mendokumentasikan seluruh tahapan pemerintahan mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja secara sistematis. Hal ini tidak hanya mempermudah konsolidasi data nasional, tetapi juga memperkuat pengawasan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara terukur. Menggunakan pisau analisis Teori George C. Edward III dan Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan ini ditopang oleh beberapa indikator utama:

1. Komunikasi dalam Implementasi SIPD

Komunikasi berjalan secara efektif melalui mekanisme rapat koordinasi dan evaluasi rutin antar OPD (seperti BPKPD, Bappelitbangda, DLH, Bakesbangpol, dan Bagian Administrasi Pemerintahan). Proses ini memastikan setiap pelaksana memahami tujuan dan prosedur operasional SIPD dengan seragam. Kondisi ini selaras dengan pandangan Edward III dan Paul A. Sabatier yang menekankan bahwa kejelasan dan konsistensi transmisi informasi sangat esensial untuk meminimalkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

2. Sumber Daya dalam Implementasi SIPD

Kapasitas institusi di Pemerintah Kabupaten Pasuruan tergolong sangat mendukung. Setiap OPD memiliki jumlah operator khusus yang memadai, ditunjang oleh sarana teknologi berupa perangkat komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak terstandarisasi. Sesuai dengan pandangan Edward III dan Merilee S. Grindle, kecukupan sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas teknis ini menjadi fondasi mutlak bagi keberhasilan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi.

3. Disposisi atau Komitmen Pelaksana Kebijakan

Aparatur pelaksana menunjukkan tingkat penerimaan dan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan SIPD. Sikap positif ini tercermin dari konsistensi mereka dalam

mengikuti koordinasi, evaluasi, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku. Hal ini memperkuat postulat Edward III serta Van Meter dan Van Horn, di mana komitmen, integritas, dan kesungguhan pelaksana sangat menentukan efektivitas berjalannya sebuah transformasi kebijakan di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi SIPD turut ditopang oleh struktur birokrasi yang tertata dengan baik. Pembagian tugas pokok, kewenangan, dan penunjukan penanggung jawab SIPD di tiap OPD telah terdefinisi dengan jelas. Penggunaan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kemendagri) diimplementasikan secara konsisten untuk memperlancar alur kerja, selaras dengan teori Edward III yang menegaskan bahwa kejelasan struktur sangat penting untuk menghindari kebingungan peran dan tumpang tindih kewenangan.

Analisis Kontribusi Implementasi Kebijakan SIPD terhadap Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasuruan

Analisis akuntabilitas dalam penelitian ini menggunakan perspektif Mardiasmo (2018), yang membagi akuntabilitas sektor publik ke dalam empat dimensi. Pendekatan ini mengkaji kontribusi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pasuruan tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dampak substantifnya terhadap transparansi, efektivitas, dan kualitas kebijakan:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Kepatuhan Hukum

SIPD mendorong kepatuhan aparatur dengan mengatur klasifikasi program dan kode rekening secara otomatis. Sistem ini berfungsi sebagai *system-based control* yang meminimalisir kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Andersen (2009) dan Putra et al. (2022) yang menegaskan bahwa *e-government* berbasis elektronik efektif mengurangi intervensi manual, menekan tingkat korupsi, dan memperkuat integritas pengelolaan keuangan.

2. Akuntabilitas Proses

Implementasi SIPD mewujudkan prinsip keterbukaan (*openness*) dan keterlacakan (*traceability*) dalam perencanaan dan penganggaran. Seluruh tahapan kini dilakukan secara digital sehingga mudah dipantau dan dievaluasi. Sesuai dengan prinsip New Public Management dan temuan Pratama & Widodo (2020), digitalisasi ini membuat koordinasi antar perangkat daerah lebih efektif dan proses pemerintahan menjadi jauh lebih transparan.

3. Akuntabilitas Program

Sistem ini mewajibkan adanya keterkaitan yang jelas antara program, indikator kinerja, dan target pembangunan. Hal ini mendukung penerapan *performance-based budgeting* (Halim & Kusufi, 2019), di mana anggaran yang disusun berorientasi pada kinerja. Dengan dokumentasi yang sistematis di dalam SIPD, evaluasi program menjadi lebih mudah dan efektivitas sasaran pembangunan dapat lebih dipastikan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

SIPD meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pimpinan daerah dengan menyediakan data yang terintegrasi dan real-time. Sejalan dengan konsep *evidence-based policy* (Head, 2016) dan pandangan OECD (2019), ketersediaan data digital yang valid membuat perumusan kebijakan menjadi lebih rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar keputusan administratif semata. Untuk memperjelas perubahan yang terjadi, berikut disajikan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi SIPD:

Tabel 1. Perbandingan Akuntabilitas Sebelum dan Sesudah Implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan

No	Dimensi Akuntabilitas	Sebelum SIPD	Sesudah SIPD	Temuan Penelitian
1	Akuntabilitas Kejujuran dan Kepatuhan Hukum	Proses administrasi belum sepenuhnya terstandarisasi dan masih bergantung pada dokumen manual	Proses sudah terstandarisasi dalam sistem SIPD sesuai regulasi	Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap regulasi
2	Akuntabilitas Proses	Proses perencanaan dan penganggaran kurang transparan dan sulit ditelusuri	Seluruh tahapan dapat ditelusuri secara digital	Transparansi dan keterlacakan meningkat
3	Akuntabilitas Program	Penilaian program belum berbasis indikator kinerja yang terukur	Program berbasis indikator kinerja dalam SIPD	Efektivitas program meningkat
4	Akuntabilitas Kebijakan	Pengambilan kebijakan cenderung administratif	Pengambilan kebijakan berbasis data	Kualitas kebijakan meningkat

Sumber : Olah data peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa implementasi SIPD telah membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas di Kabupaten Pasuruan. Sebelum penerapan SIPD, proses administrasi dan pengelolaan pemerintahan masih bersifat manual dan kurang terintegrasi, sehingga berdampak pada rendahnya transparansi dan keterlacakan. Namun, setelah implementasi SIPD, seluruh proses menjadi lebih terstruktur, terintegrasi, dan berbasis sistem digital, sehingga meningkatkan akuntabilitas pada seluruh dimensi.

Berdasarkan hasil analisis, implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa sistem ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. SIPD mampu memperkuat seluruh dimensi akuntabilitas, mulai dari kepatuhan hukum, transparansi proses, efektivitas program, hingga kualitas kebijakan. Selain itu, implementasi SIPD juga mencerminkan adanya transformasi dari sistem pemerintahan konvensional menuju digital governance yang lebih modern.

SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen integrasi, kontrol, dan pengambilan keputusan dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan peningkatan pelatihan teknis, serta ketergantungan pada sistem yang dikelola secara terpusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi aparatur serta penguatan infrastruktur teknologi agar implementasi SIPD dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi SIPD di Kabupaten Pasuruan telah membuktikan bahwa sinergi antara komunikasi terstruktur, optimalisasi sumber daya, dan disposisi aparatur yang kuat merupakan katalis utama dalam mewujudkan good governance. Dengan struktur birokrasi yang jelas, pemerintah daerah berhasil mengelola transisi budaya kerja dari manual ke digital (extent of change), yang secara nyata mendongkrak empat pilar akuntabilitas: kepatuhan hukum, transparansi proses, efektivitas program, dan pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Namun, capaian positif ini masih dibayangi oleh keterbatasan infrastruktur server di tingkat pusat yang kerap mengalami lumpuh sistem (down) saat lonjakan akses nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital daerah sangat bergantung pada stabilitas ekosistem teknologi di level nasional.

Rekomendasi dari penelitian ini yakni penguatan, ketersediaan *dedicated server* berkapasitas tinggi dan inovasi fitur upload dokumen menjadi mendesak untuk menekan risiko human error. Lebih jauh lagi, sinkronisasi waktu operasional portal dengan jam kerja efektif aparatur adalah prasyarat mutlak untuk menjaga ritme koordinasi yang sehat.

Pada akhirnya, transformasi melalui SIPD bukan sekadar persoalan migrasi aplikasi, melainkan sebuah keharusan eksistensial bagi masa depan akuntabilitas daerah. Kegagalan dalam mengoptimalkan sistem ini akan menghambat kecepatan respons pemerintah terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola digital adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan birokrasi yang tidak hanya transparan, tetapi juga adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

REFERENSI

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Andersen, T. B. (2009). E-Government As An Anti-Corruption Strategy. *World Development*, 37(1), 201–210.
- Bovens, M. (2007). Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Brockwell, E., & Elofsson, K. (2020). The Role Of Water Quality For Local Environmental Policy Implementation. *Journal Of Environmental Planning And Management*, 63(6), 1001–1021.
- Doramia, A. L. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E- Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 221.
- Garst, B., Dubin, A., Bunke, C., Schellpfeffer, N., Gaslin, T., Ambrose, M., & Hashikawa, A. (2021). Barriers Impacting Organizational Immunization Policy Implementation In U.S. And Canadian Summer Camps. *Children’s Health Care*, 50(2), 207–219.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Head, B. W. (2016). Toward More “Evidence-Informed” Policy Making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484.
- Hood, C. (2010). Accountability And Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple? *West European Politics*, 33(5), 989–1009.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy Failure And The Policy-Implementation Gap: Can Policy Support Programs Help? *Policy Design And Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Islamy, M. I. (2018). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Pt Bina Aksara.
- Iriawan, M. (2019). *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik Ke Kontemporer*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Ui Press.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Aceh: Unimal Press.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Muslih, M., Rahadi, D. R., & Marbun, S. O. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, February, 1–7.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021a). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/Jak.V9i2.4577>

- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Oecd. (2019). *Digital Government Review: Enhancing Public Sector Performance*. Paris: Oecd Publishing
- Pratama, A. B., & Widodo, J. (2020). Digitalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Transparansi. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115–130.
- Putra, R. D., Sari, N., & Nugroho, A. (2022). Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 14(1), 45–58.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
- Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Eyne, A., Gazali, A., & Salindeho, A. (2021). Analysis Of Local Government Information System (Sipd) Implementation At Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Bitung City Government.
- Purwanto, E. A., & Sulisyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Roengtam, S., & Agustiyara, A. (2022). Collaborative Governance For Forest Land Use Policy Implementation And Development. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2073670. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2073670>
- Said, M. M. (1987). *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Salindeho, A. (2017). *The Role Of Regional Government Information System (Sipd) On The Sub-District Of Aertembaga's Financial Accountability (2017–2020)*.
- Sari, D., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 25(1), 67–80.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.